



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



LAPORAN EVALUASI INTERNAL DISDAGRIN TRIWULAN I TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2024. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I merupakan sarana penyajian data dan informasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Banggai yang terdiri atas evaluasi program, kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hasil Evaluasi Internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai penyajiannya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah berjalan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal Triwulan I ini serta kami menyadari dengan segala kekurangan bahwa Laporan Evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya dengan segala kerencahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar penyusunan laporan evaluasi menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Luwuk, 03 April 2024

 **KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANGGAI**
DES. NATALIA PATOLEMBA, M. Si
NIP. 19741227 199410 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Tujuan 4

 C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian..... 4

 1. Visi dan Misi..... 4

 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 5

BAB II EVALUASI..... 7

 A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi PAD 7

 B. Evaluasi Capaian Realisasi Anggaran dan Program/Kegiatan Triwulan I 15

BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI 24

 A. Permasalahan 24

 B. Rekomendasi..... 24

BAB IV PENUTUP 25

Lampiran I Dokumentasi Rapat Evaluasi Internal Triwulan I 26

Lampiran II Daftar Hadir Rapat Evaluasi Internal Triwulan I..... 27

Lampiran III Notulen Rapat Evaluasi Internal Triwulan I 29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai wujud pertanggung jawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan.
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2024.
3. Sebagai tolak ukur perbaikan dan evaluasi untuk capaian program/kegiatan pada triwulan II Tahun 2024 kedepan.

C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai

1. Visi dan Misi

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam "VISI" Keberhasilan pembangunan, khususnya dalam melaksanakan otonomi daerah, dimana diuntut suatu kemandirian dan kemampuan untuk memacu pertumbuhan perekonomian di daerah, oleh karena itu Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Banggai menetapkan Visi yaitu :

**“Terwujudnya Pembangunan Perdagangan dan Industri yang Efektif,
Terpercaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**

Setelah dirumuskan visi, maka perlu ditetapkan misi untuk mewujudkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil, untuk itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai menetapkan 5 (Lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dan sumber daya aparatur.
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri dan promosi perdagangan.
3. Meningkatkan sarana distribusi dan stabilitas harga.
4. Meningkatkan perlindungan konsumen dan standarisasi serta tertib ukur.
5. Meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah berbasis kearifan lokal.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang ESDM.

2. Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Perdagangan.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perdagangan.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perdagangan.
- d. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Perdagangan

3. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Jabatan Fungsional Perencana.

3. Unsur Pelaksana Yaitu :

- a. Bidang Perdagangan dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Promosi Perdagangan terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Bidang Sarana Distribusi dan Stabilitas Harga terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perlindungan Konsumen dan Standarisasi serta Tertib Ukur terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - UPT Pasar.
 - UPTD Metrologi.
 - UPT Industri Kecil Menengah.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai

BAB II
EVALUASI

A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi PAD

Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Realisasi PAD triwulan I tahun 2024 sesuai tabel berikut :

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	12%	-83,33%	-694%
		Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga	35%	33,97%	97,05%
2	Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase Pertumbuhan IKM di Daerah	10%	-73,3%	-733%

1) Indikator : Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas :

Tabel 2.2
Data Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2023 dan 2024

No.	Eksportir	Jenis Komoditas	Tahun 2023		Tahun 2024 (TW I)	
			Jumlah	(Rp)	Jumlah	(Rp)
1.	PT. Sasl And Sons Indonesia	Tepung Kelapa, Minyak Kelapa	1.959.415,30 Kgm	53.012.558.284,80	368.619,280 Kgm	9.222.994.691,43
2.	CV. Indotropic Fishery	Gurita	372.203,02 Kgm	35.367.076.300,80	63.854,500 Kgm	5.510.268.483,72
Total				88.379.634.585,60		14.733.263.175,15

Persentase
Pertumbuhan
Nilai Ekspor
Non Migas

=
$$\frac{\text{Jumlah Nilai Ekspor Non Migas Tahun ke } n - \text{Jumlah Nilai Ekspor Non Migas Tahun ke } (n - 1)}{\text{Jumlah Nilai Ekspor Non Migas Tahun ke } (n - 1)} \times 100\%$$
$$= \frac{14.733.263.175,15 - 88.379.634.585,60}{88.379.634.585,60} \times 100\%$$
$$= \frac{- 73.646.371.410,45}{88.379.634.585,60} \times 100\%$$
$$= -83,33\%$$

Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas :

Capaian Kinerja
Persentase
Pertumbuhan
Nilai Eksport
Non Migas

=

Realisasi Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas Tahun 2024
Target Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas Tahun 2024

100%

=

-83,33
12

100%

= -694%

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas mengalami penurunan pada TW I dari target yang ditentukan sebesar 12% dengan realisasi sebesar -83,33% serta capaian sebesar -694% yang dikategorikan sangat rendah. Kurangnya Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya permintaan komoditas eksport dari bebarapa negara sehingga para eksportir mengurangi jumlah produksinya, serta adanya perusahaan Eksportir non migas yang belum banyak melakukan eksport.

b) Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Analisa Efisiensi Sumber Daya

Tabel 2.3
Data Efisiensi Anggaran yang Mendukung
Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Triwulan	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	I, II, III, IV	272.040.000	0	0%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	I, II, III, IV	272.040.000	0	0%
Pameran Dagang Nasional	II	121.904.000	0	0%
Pameran Dagang Lokal	I, II, III, IV	110.592.000	0	0%
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	IV	39.544.000	0	0%

Dari sasaran strategis di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai yaitu Meningkatnya Kinerja Perdagangan dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas kinerjanya tidak mencapai target yang diharapkan. Program Pengembangan Ekspor akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya yaitu triwulan II dan III.

2) Indikator : Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas :

Tabel 2.4
Data Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga Tahun 2024

No	Usaha/Niaga	Tahun 2024	
		Jumlah Tertib Usaha/Niaga	Jumlah Usaha/Niaga yang Terdata/Potensi
1.	Pelaku Usaha Eksportir	4	5
2.	Pedagang Pasar yang Memiliki SPTU	36	1.070
3.	Pengusaha Minuman Beralkohol	0	19
4.	Pengguna Tol Laut Gerai Maritim	4	11
5.	Pemilik Gudang	0	30
6.	Distributor Bapokting	12	12
7.	Distributor Pupuk Bersubsidi	5	5
8.	Penyalur Pupuk Bersubsidi	0	98
9.	Agen Gas LPG Bersubsidi	7	7
10.	Pangkalan Agen Gas LPG Bersubsidi	1063	1063
11.	Pengusaha Tertib UTTP	14	1051
Total		1.145	3.371

Persentase
Usaha
Perdagangan
yang Tertib
Usaha/Niaga

=

Jumlah Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga

Jumlah Usaha/Niaga

100%

=

1.145 Usaha/Niaga

3.371 Usaha/Niaga

100%

= 33,97%

Capaian Kinerja Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga :

Capaian Kinerja
Persentase
Usaha
Perdagangan
yang Tertib
Usaha/Niaga

=

Realisasi Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha atau Niaga Tahun 2024

Target Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha atau Niaga Tahun 2024

100%

=

33,97%

35

100%

= 97,05%

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga melebihi target yang ditentukan sebesar 35% dengan realisasi sebesar 33,97% serta capaian sebesar 97,05% yang dikategorikan tinggi. Meningkatnya Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga tersebut dipengaruhi dengan adanya koordinasi, pengawasan dan pembinaan bagi Pelaku Usaha Distributor Bapokting, Distributor Pupuk Bersubsidi, Penyalur Pupuk Bersubsidi, Agen Gas LPG Bersubsidi dan Pangkalan Gas LPG bersubsidi sehingga Usaha/Niaga telah sesuai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun bagi pelaku usaha wajiib UTTP yang melakukan tera/tera ulang sebesar 14 dari

potensi sebesar 1051. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu petugas pengawas kemetrolagian belum tersedia, tidak tersedianya petugas reparatir timbangan (pihak ketiga) yang terlatih untuk memperbaiki timbangan yang rusak sehingga dalam pelaksanaan tera/tera ulang belum maksimal serta tidak tersedianya petugas juru timbang serta kurangnya pedagang pasar yang Memiliki SPTU yaitu sebesar 36 dari potensi yang ada sebesar 1.070 SPTU, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman para pedagang pasar tentang pemanfaatan SPTU pasar.

b) Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Analisa Efisiensi Sumber Daya

Tabel 2.5
Data Efisiensi Anggaran yang Mendukung Persentase Usaha
Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Triwulan	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	I, II, III, IV	58.804.250	12.097.000	20,57%
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	I	12.388.500	12.097.000	97,65%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	I	12.388.500	12.097.000	97,65%
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	III	17.654.050	0	0%
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	III	17.654.050	0	0%
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	III	1.613.300	0	0%
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	III	1.613.300	0	0%
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	II	7.939.800	0	0%
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	II	7.939.800	0	0%
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	IV	4.447.500	0	0%
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	IV	4.447.500	0	0%
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	III	14.761.100	0	0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	III	14.761.100	0	0%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	I, II, IV	1.764.756.568	2.730.000	0,15%

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	I, II, IV	1.755.006.568	2.730.000	0,16%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	I, II	1.700.970.568	1.300.000	0,08%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	I, II, IV	54.036.000	1.430.000	2,65%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	II	9.750.000	0	0%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	II	9.750.000	0	0%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	I, II, III, IV	1.952.352.700	39.267.000	2,01%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	II, IV	26.040.200	0	0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	II, IV	26.040.200	0	0%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	I, II, III, IV	1.909.326.000	0	0%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	I, II, IV	15.485.000	754.000	4,87%
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	I, II, III, IV	1.893.841.000	31.150.000	1,64%
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	I, II, III	16.986.500	0	0%
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	I	7.363.000	7.363.000	100%
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	II, III	9.623.500	0	0%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	I, II, III, IV	284.505.500	0	0%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	I, II, III, IV	284.505.500	0	0%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	I, II, III, IV	163.826.000	0	0%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	I, II, III, IV	115.573.000	0	0%
Penyidikan Metrologi Legal	IV	5.106.500	0	0%

Dari sasaran strategis di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai yaitu Meningkatnya Kinerja Perdagangan dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga kinerjanya sudah melebihi target dengan tingkat efisiensi anggaran yaitu Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan sebesar 20,57%, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 0,15%, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar 2,01%, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar 0%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi di beberapa pos anggaran pendukung, koordinasi antar bidang dan sekretariat untuk saling dukung/bantu dalam

penyelesaian kegiatan, perencanaan anggaran yang lebih teliti dan terencana serta kegiatan yang bersifat mandatori.

3) Indikator : Persentase Pertumbuhan IKM di Daerah :

Tabel 2.6
Data Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2023 dan 2024

No.	TAHUN DATA	TOTAL
1. 2) 2. 3)	Data IKM Tahun 2023	75 IKM
	Data IKM Tahun 2024	20 IKM

Persentase
Pertumbuhan
IKM di Daerah

=

Jumlah IKM Tahun ke n – Jumlah IKM Tahun ke (n – 1)

Jumlah IKM Tahun ke (n – 1)

100%

=

20 – 75

75

100%

=

–55

75

100%

= –73,3%

Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan IKM di Daerah :

Capaian Kinerja
Persentase
Pertumbuhan
IKM di Daerah

=

Realisasi Pertumbuhan IKM di Daerah Tahun 2024

Target Pertumbuhan IKM di Daerah Tahun 2024

100%

=

–73,3

10

100%

= –733%

a) Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Persentase Pertumbuhan IKM di Daerah

Berdasarkan perhitungan diatas, Persentase Pertumbuhan IKM di Daerah belum melebihi target yang ditentukan sebesar 10% dengan realisasi sebesar -73,3% serta capaian sebesar -733% yang dikategorikan rendah. Rendahnya pertumbuhan IKM tersebut dikarenakan adanya wilayah kecamatan yang belum sepenuhnya dilakukan pendataan serta pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai akan dilakukan di triwulan berikutnya.

b) Analisis Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Analisa Efisiensi Sumber Daya

Tabel 2.7
Data Efisiensi Anggaran yang Mendukung Pertumbuhan IKM di Daerah

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Triwulan	Anggaran	Realisasi	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	I, II, III, IV	725.711.400	38.348.200	5,28%
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	I, II, III, IV	725.711.400	38.348.200	5,28%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	III	149.500	0	0%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	I, II, III, IV	710.445.900	38.348.200	5,40%
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	II	15.116.000	0	0%
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	I, II	18.157.700	0	0%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	I, II	18.157.700	0	0%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	I, II	18.157.700	0	0%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	I, II, III, IV	61.784.100	0	0%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	I, II, III, IV	61.784.100	0	0%
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	I, II, III, IV	61.784.100	0	0%

Dari sasaran strategis di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai yaitu Meningkatnya Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan indikator Persentase Pertumbuhan IKM di Daerah kinerjanya belum mencapai target dengan tingkat efisiensi anggaran yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar 5,28%, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota sebesar 0% dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar 0%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi di beberapa pos anggaran pendukung, koordinasi antar bidang dan sekretariat untuk saling dukung/bantu dalam penyelesaian kegiatan, perencanaan anggaran yang lebih teliti dan terencana, serta pemanfaatan TW I dalam pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi atas capaian Realisasi PAD triwulan I tahun 2023 sesuai tabel berikut :

Tabel 2.8 Capaian Realisasi PAD Triwulan I

No	Uraian	Target	Realisasi Triwulan I	Capaian
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp. 2.414.456.500,-	Rp.419.019.000,-	17,35%
Total		Rp. 2.414.456.500,-	Rp. 419.019.000,-	17,35%

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat persentase pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Triwulan I tahun 2024 sebagai berikut :

1. Persentase capaian retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dengan realisasi Triwulan I sebesar 17,35%.

Realisasi pendapatan asli daerah triwulan I tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Faktor penyebab tidak tercapainya target PAD Retribusi Pasar yaitu :
- a. Potensi Pasar tidak sesuai dengan target retribusi yang ditetapkan.
 - b. Kurangnya kesadaran dari wajib retribusi pasar untuk membayar retribusi pasar.
 - c. Kurangnya dukungan anggaran dalam melakukan sosialisasi di 14 Pasar yang terdapat pada 13 Kecamatan.
 - d. Kurangnya dukungan prasarana bagi penarik retribusi (Kendaraan Operasional Roda Dua).
 - e. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap petugas penarik retribusi.
 - f. Rendahnya honorarium petugas penarik retribusi.

B. Evaluasi Capaian Realisasi Anggaran dan Program/Kegiatan

Evaluasi atas capaian realisasi anggaran dan capaian program kegiatan pada Triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Capaian Realisasi Anggaran dan Capaian Program Kegiatan Triwulan I

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Triwulan	Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Indikator	Target	Satuan	Realisasi Triwulan I
2	3	4	5	6	7	8		9
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGGAI	I,II,III,IV	15.086.503.679	1.213.579.910	8,04%	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.414.456.500	Rp.	419.019.000
					Persentase Pertumbuhan Nilai Eksport Non Migas	12%	%	-83,33%
					Persentase Usaha Perdagangan yang Tertib Usaha/Niaga	35%	%	33,97%
					Persentase Pertumbuhan IKM di Daerah	10%	%	-73,3%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	I,II,III,IV	9.933.151.011	1.121.137.710	11,29%	1. Predikat Sakip Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2. Nilai RB Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3. Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Aktif	A B 3	SAKIP RB Inovasi	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	I,II,III,IV	199.317.650	52.751.750	26,47%	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang Tepat Waktu, tepat Proses dan tepat isi.	7 2	Dokumen, Laporan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	I,II	25.215.250	12.895.250	51,14%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	I,III	20.121.500	6.747.500	33,53%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	II,III	20.348.000	0	0,00%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	I,IV	26.861.500	7.668.000	28,55%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	II,III	20.107.500	0	0,00%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	I,II,III,IV	61.962.000	22.999.000	37,12%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	I,II,III,IV	24.701.900	2.442.000	9,89%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	I,II,III,IV	6.944.915.414	717.563.777	10,33%	Persentase Serapan Anggaran Sesuai Tepra	100	%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	I	3.947.757.211	660.991.777	16,74%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	Orang/bulan	3
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	I,II,III,IV	2.942.119.203	53.084.000	1,80%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	IV	40.031.000	0	0,00%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	I,II,III,IV	15.008.000	3.488.000	23,24%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	I,II,III,IV	10.240.050	0	0,00%	Tingkat Pemenuhan Terhadap pengelolaan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100	%	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	I,II,III,IV	10.240.050	0	0,00%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	0

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	I,II,III,IV	70.156.600	47.924.600	68,31%	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Kepegawaian	100	%	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	I	30.000.000	30.000.000	100,00%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	Paket	60
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	I,II,III,IV	40.156.600	17.924.600	44,64%	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	2
Administrasi Umum Perangkat Daerah	I,II,III,IV	629.528.405	89.252.212	14,18%	Persentase Terpenuhiya Layanan Administrasi Umum Pada Perangkat Daerah	100	%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	I	2.661.655	0	0,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	I,III	11.648.250	8.915.625	76,54%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	I,II,III,IV	53.370.000	13.332.000	24,98%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.500	Paket	429
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	I,II,III,IV	81.493.500	0	0,00%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.500	Paket	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	I,II,III,IV	10.320.000	0	0,00%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	Dokumen	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	I	470.035.000	67.004.587	14,26%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	I	709.259.600	0	0,00%	Persentase terpenuhinya barang milik daerah yang dibutuhkan perangkat daerah	100	%	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	I	204.600.000	0	0,00%	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	Unit	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	I	327.360.000	0	0,00%	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	I	177.299.600	0	0,00%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	I,II,III,IV	1.287.763.292	210.665.071	16,36%	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	I	5.000.000	600.000	12,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	Laporan	60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	I,II,III,IV	109.163.292	18.465.071	16,92%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	I,II,III,IV	1.173.600.000	191.600.000	16,33%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	115	Laporan	28
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	I,II,III,IV	81.970.000	2.980.300	3,64%	Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara	100	%	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	I	39.050.000	2.980.300	7,63%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	I	35.650.000	0	0,00%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	I,II,III,IV	7.270.000	0	0,00%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	0
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	I,II,III,IV	58.804.250	12.097.000	20,57%	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin dengan Ketentuan (IUP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	20	%	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	I	12.388.500	12.097.000	97,65%	Persentase yang diterbitkan sesuai dengan Ketentuan untuk Izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	25	%	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	I	12.388.500	12.097.000	97,65%	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20	Dokumen	20
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	III	17.654.050	0	0,00%	Persentase Penerbitan TDG	20	Dokumen	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	III	17.654.050	0	0,00%	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	20	Dokumen	0
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	III	1.613.300	0	0,00%	Persentase Penerbitan STPW yang tepat Waktu untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam Negeri	20	%	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	III	1.613.300	0	0,00%	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	20	Dokumen	0
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	II	7.939.800	0	0,00%	Persentase Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Memiliki Izin	20	%	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	II	7.939.800	0	0,00%	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20	Dokumen	0
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	IV	4.447.500	0	0,00%	Persentase Pemeriksaan Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten	20	%	

Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	IV	4.447.500	0	0,00%	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1	Laporan	0
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	III	14.761.100	0	0,00%	Persentase Penerbitan SPKA yang tepat waktu	20	%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	III	14.761.100	0	0,00%	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1	Dokumen	0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	I,II,III,IV	272.040.000	0	0,00%	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas	20	%	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	I,II,III,IV	272.040.000	0	0,00%	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produksi Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Satu Daerah	Pameran Kegiatan	3 1	
Pameran Dagang Nasional	II	121.904.000	0	0,00%	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1	Pelaku Usaha	0
Pameran Dagang Lokal	I,II,III,IV	110.592.000	0	0,00%	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1	Pelaku Usaha	0
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	IV	39.544.000	0	0,00%	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	1	Pelaku Usaha	0
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	II	10.550.350	0	0,00%	Persentase Produk IKM dan UMKM Lokal yang dikonsumsi/digunakan Oleh Masyarakat	20	%	0
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	II	10.550.350	0	0,00%	Cakupan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk IKM dan UMKM Lokal	20	%	0
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	II	10.550.350	0	0,00%	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5	UMKM	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	I,II,IV	1.764.756.568	2.730.000	0,15%	Persentase Kontribusi Sarana Distribusi Perdagangan Terhadap Retribusi Daerah	20	%	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	I,II,IV	1.755.006.568	2.730.000	0,16%	Jumlah Retribusi Daerah yang di Hasilkan dari Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	I,II	1.700.970.568	1.300.000	0,08%	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit	0
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	I,II,IV	54.036.000	1.430.000	2,65%	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	Unit	0
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	II	9.750.000	0	0,00%	Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	30	Orang	

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	II	9.750.000	0	0,00%	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	I,II,III,IV	1.952.352.700	39.267.000	2,01%	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	20	%	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	II,IV	26.040.200	0	0,00%	Tingkat Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten	3	Laporan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	II,IV	26.040.200	0	0,00%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	Laporan	0
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	I,II,III,IV	1.909.326.000	31.904.000	1,67%	Cakupan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten	1	Laporan	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	I,II,IV	15.485.000	754.000	4,87%	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10	Laporan	3
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	I,II,III,IV	1.893.841.000	31.150.000	1,64%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	0
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	I,II,III	16.986.500	7.363.000	43,35%	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	20	%	
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	I	7.363.000	7.363.000	100,00%	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1	Dokumen	1
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	II,III	9.623.500	0	0,00%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	Laporan	0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	I,II,III,IV	284.505.500	0	0,00%	Persentase Alat-alat, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku dan Jumlah Barang dan Jasa Sesuai Mutu	20	%	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	I,II,III,IV	284.505.500	0	0,00%	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	20	%	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	I,II,III,IV	163.826.000	0	0,00%	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan di Tera Ulang	2.000	Unit	0
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	I,II,III,IV	115.573.000	0	0,00%	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang di Bina	50	Orang	0
Penyidikan Metrologi Legal	IV	5.106.500	0	0,00%	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2	Unit	0

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	I,II,III,IV	725.711.400	38.348.200	5,28%	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK	100	%	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	I,II,III,IV	725.711.400	38.348.200	5,28%	Jumlah Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RPIP yang ditetapkan Dalam RPIK yang di Capai	6	Laporan	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	III	149.500	0	0,00%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	I,II,III,IV	710.445.900	38.348.200	5,40%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	Dokumen	1
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	II	15.116.000	0	0,00%	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2	Dokumen	0
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	I,II	18.157.700	0	0,00%	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Dan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Menengah yang di Keluarkan Oleh Instansi Terkait	20	%	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	I,II	18.157.700	0	0,00%	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang diterbitkan	20	%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	I,II	18.157.700	0	0,00%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri	1	Laporan	0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	I,II,III,IV	61.784.100	0	0,00%	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten yang Masuk Dalam SIINAS Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	20	%	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	I,II,III,IV	61.784.100	0	0,00%	Ketersediaan Informasi Industri Kewenangan Kabupaten Secara Lengkap dan Terkini	50	IKM	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	I,II,III,IV	61.784.100	0	0,00%	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	50	Dokumen	0

PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	III	4.690.100	0	0,00%	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Izin di Kabupaten	25	%	
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	III	4.690.100	0	0,00%	Capaian Kinerja Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten	25	%	
Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	III	4.690.100	0	0,00%	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	2	Dokumen	0

Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada Triwulan I adalah Rp.1.213.579.910,- dari jumlah anggaran tahun 2024 sebesar Rp.15.086.503.679,- sehingga persentase capaian realisasi anggaran untuk Triwulan I tahun 2024 sebesar 8,04%.

BAB III

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai pada Triwulan I tahun 2024, sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai yaitu persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas Triwulan I Tahun 2024 masih sangat rendah yaitu sebesar -83,33% dari target 12% dengan capaian -694%. Hal ini dikarenakan masih rendahnya permintaan komoditas ekspor non migas.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai yaitu persentase pertumbuhan IKM di daerah Triwulan I Tahun 2024 masih rendah yaitu sebesar -73,3% dengan capaian sebesar -733%. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum dilakukan pendataan Pelaku Usaha Industri Kecil Menengah (IKM).
3. Pencapaian PAD yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai pada Triwulan I tahun 2024 masih rendah.

4. Rekomendasi

Rekomendasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan realisasi anggaran dan pencapaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai pada triwulan I tahun 2024, sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai khususnya Bidang Perdagangan dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Promosi Perdagangan perlu melakukan koordinasi dengan para Eksportir yang ada di Kabupaten Banggai serta aktif melakukan promosi komoditas ekspor unggulan untuk meningkatkan nilai ekspor non migas.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai khususnya Bidang Perindustrian perlu melakukan pendataan Industri Kecil Menengah (IKM) pada wilayah Kecamatan yang belum dilakukan pendataan.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai khususnya pengelola PAD perlu melakukan penagihan retribusi tepat waktu agar target retribusi tahun 2024 dapat tercapai.

BAB IV
PENUTUP

Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masih rendah. Dengan melakukan analisa dan identifikasi maka perlu dilakukan penanganan yang serius dari bidang teknis terkait agar dapat tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Luwuk, 03 April 2024


KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANGGAI
Des. NATALIA PATOLEMBA, M. Si
NIP. 19741227 199410 1 001

Lampiran I : Dokumentasi Rapat Evaluasi Internal Triwulan I



Lampiran II : Daftar Hadir Rapat Evaluasi Internal Triwulan I



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Ir. Sukarno No. 1 Telp. (0461) 21114, 22014 Fax. (0461) 22014
Email : disperindagluwuk@gmail.com
LUWUK 94711

DAFTAR HADIR RAPAT

Dalam rangka :
Hari/Tanggal : 3 April 2024 (Rapat Evaluasi Internal TW I)

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. Natalia P. M.Si	Kepala Dinas		
2.	Rudiyanto, N.	Disdagrin	Stekdis	
3.	Ardia Muidady	Disdagrin	Kabid Industri	
4.	Erihardyati M	"	Kabid Perdagangan	
5.	Clan Liu	"	St Perencanaan	
6.	Katrina	"	Staf	
7.	M. Arif J	"	Kabid Metakasi	
8.	Harwan S	DISDAGRIN	UPT PASAR	
9.	Murwan Hila	UPT Suka Mera	Kepu Suka Mera	
10.	HARM. R W	NETRASI	Manajemen	
11.	APRIANI OTOTAN	DISDAGRIN	Analisis	
12.	Anfan	"	Staf	
13.	Arriansyah	"	"	
14.	Ayutau	"	"	
15.	Sri Ayu Lestari W	Dinas Perdagangan	Staf	
16.	Anggun L.	"	"	
17.	Nosvalty L	Disperindag	Kasubag	
18.	Ramawati Dapitla	Disperindag	Staf / Bendah	
19.	FERY S	"	Sub By Kes	
20.	XULIYANTI L	"	Staf	
21.	Irham Firdaus	Dinas Dagrin	Staf	
22.	Murhayati	"	"	
23.	Jaini	"	"	
24.	Mika Yuliyanti	"	"	
25.	Henastika T.	"	"	
26.	Praktiwi	"	"	

Luwuk, 03 April 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANGGAI

Des. NATALIA PATOLEMBA, M. Si
NIP. 19741227 199410 1 001

Lampiran III : Notulen Rapat Evaluasi Internal Triwulan I



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jln. Ir. Soekarno No. 1 Telp (0461) 21114 22015, Fax. (0461) 22015

Email : disperindagluwuk@gmail.com

L U W U K 94711

CATATAN HASIL RAPAT

- | | |
|-------------------|--|
| a. Hari/tanggal | : Rabu, 03 April 2024 |
| b. Kegiatan | : Rapat Evaluasi Internal TW I |
| c. Tempat | : Ruang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banggai |
| d. Jam | : 13.00 WITA - Selesai |
| e. Peserta | : Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional / Eselon IV, Admin Bidang, Perencana Bidang, Bendahara Bidang |
| f. Pimpinan Rapat | : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banggai |
| g. Hasil Rapat | : <ul style="list-style-type: none">- Untuk Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Promosi Perdagangan, dana untuk kegiatannya memang terdapat kekurangan.- Kegiatan Bidang Industri di TW I untuk monitoring di Desa Uwe Daka Daka belum terlaksana, Kepala Dinas meminta agar segera di tindak lanjut.- Kepala Dinas meminta agar seluruh Kepala Bidang untuk mengevaluasi dan mengecek kembali kegiatan di TW I dan segera laksanakan terutama yang bersifat urgent.- Untuk Bidang Perlindungan Konsumen dan Standarisasi serta Tertib Ukur, terdapat 1 kegiatan perjalanan ke Palu yang belum terlaksana.- Untuk Bidang Perlindungan Konsumen dan Standarisasi serta Tertib Ukur, juga terdapat evaluasi terkait TERA/ TERA Ulang yang mana potensinya 1000 terlalu jauh dari target yang telah dicapai yaitu 300. Kepala Dinas menyarankan untuk menurunkan targetnya.- Untuk kegiatan pengawasan barang, Kepala Dinas menyarankan agar pelaksanaannya berkoordinasi dengan BPOM.- Kepala Dinas menyarankan agar Bidang Perlindungan Konsumen dan Standarisasi serta Tertib Ukur untuk segera menetapkan siapa pegawai yang akan mengikuti diklat penera.- Untuk UPT Sentra IKM, Kepala Dinas meminta kepada KUPT Sentra IKM agar segera dibuatkan Kerangka Acuan Kerjanya beserta dasar-dasar pembentukan UPT Sentra IKM.- Kepala Dinas meminta agar Bidang Sarana menyiapkan pertanggungjawaban untuk kegiatan KUPT Pasar.- Untuk kegiatan pengawsan gas elpiji, Kepala Dinas meminta agar semua pengawas ikut turun mengawasi.- Kepala Dinas menyarankan agar semua kegiatan melibatkan pengawas perdagangan. |

- Kegiatan UPT Pasar di TW I terdapat satu kegiatan yang belum terlaksana yaitu pengadaan ATK.
- Untuk pembangunan Pasar Simpong, KUPT Pasar menyampaikan saran dari kontraktor agar merelokasi pedagang-pedagang yang ada di zona 2.

Demikian Catatan Hasil Rapat dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Luwuk, 03 April 2024

**KABUPATEN BANGGAI**
DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANGGAI
Des. NATALIA PATOLEMBA, M. Si
NIP. 19741227 199410 1 001